

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap negara tentunya menghendaki masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan sebuah proses peningkatan produk nasional yang disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas faktor produksi atau bahkan karena adanya teknologi baru. Adanya kenaikan output perkapita secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang juga disebut dengan proses pembangunan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan peningkatan dari produk nasional yang hanya disebabkan oleh peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Dalam hal ini berarti terdapat sebuah peningkatan dalam pendapatan nasional yang dibuktikan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan peningkatan dalam pendapatan daerah dibuktikan oleh besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian suatu negara dapat dikatakan tumbuh atau berkembang apabila tingkat kegiatannya lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi acuan atau tolak ukur dari perekonomian disuatu daerah, semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi disuatu daerah maka dapat diasumsikan bahwa masyarakat yang ada didaerah tersebut semakin sejahtera. Dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi dapat diartikan sebagai gambaran dari pertumbuhan (Wahyudin & Yuliadi, 2013).

Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa produktivitas tenaga kerja merupakan sebuah faktor eksogen yang bergantung pada rasio tenaga kerja dan modal manusia, serta ditambah dengan faktor lain yang berkaitan dengan kemajuan teknis, tetapi manfaat dari bidang pendidikan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Dalam teori model pertumbuhan Solow, laju pertumbuhan produktivitas dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada dan tidak diberikan penjelasan mengapa peningkatan produktivitas terkadang pesat dan terkadang melambat. Terdapat teori pertumbuhan ekonomi yang baru, yaitu teori endogen yang telah dikembangkan sejak tahun 1980 dengan memperbaiki kekurangan yang sudah ada dalam teori klasik, yakni menekankan pentingnya pendidikan dan inovasi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa pada tahun 2010 – 2019 mengalami fluktuasi. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.1. yang memuat besaran laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Rata-rata tertinggi dari laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa adalah pada Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta rata-rata laju pertumbuhannya menempati posisi tertinggi

kedua yaitu sebesar 5,24%. Sedangkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Provinsi Banten yang hanya sebesar 4,10%.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa
tahun 2010 – 2019 (persen)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jawa Barat	6.73	4.78	4.82	4.70	3.52	3.52	4.17	3.89	4.26	3.72	4.41
Jawa Tengah	5.30	4.40	4.47	4.27	4.46	4.68	4.49	4.52	4.59	4.72	4.59
Jawa Timur	6.44	5.66	5.90	5.37	5.18	4.80	4.96	4.87	4.94	5.00	5.31
Jakarta	6.73	5.51	5.34	4.92	4.81	4.84	4.84	5.21	5.22	4.98	5.24
Yogyakarta	5.21	3.94	4.11	4.23	3.95	3.75	3.87	4.11	5.06	5.48	4.37
Banten	7.03	4.53	4.40	4.31	3.24	3.24	3.14	3.67	3.81	3.59	4.10

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan investasi untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan sarana dan prasarana. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk mencari sumber alternatif pembiayaan dalam negeri dan sumber dana dari luar negeri. Alternatif pembiayaan tersebut dikenal dengan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA. Keduanya sama-sama memiliki kepentingan dan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dumairy, 1996). Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu sumber dana dari pembiayaan dalam negeri ditengah keterbatasan dana APBN dan APBD yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ardiansyah et al., 2020). Sedangkan penanaman modal asing merupakan sumber dana yang diperoleh dari pembiayaan luar negeri. Penanaman modal merupakan sebuah langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi di suatu daerah atau negara.

Selain investasi dalam bentuk dukungan dana, investasi juga dapat berbentuk *human capital* atau modal manusia. Dalam terminologi ekonomi, modal manusia sering digunakan didalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktifitas (Suparno, 2014). Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menjelaskan bahwa berinvestasi pada modal fisik dan modal manusia dapat berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dalam waktu jangka panjang (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018), kontribusi modal manusia sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada level provinsi secara empiris terbukti dengan menunjukkan nilai yang positif pada variabel pendidikan. Suatu perusahaan berinvestasi terhadap sumber daya manusia karena perusahaan tersebut memandang bahwa manusia merupakan sebuah aset dan mengharapkan apa yang telah diinvestasikan akan memberikan nilai positif dikemudian hari (Wuttaphan, 2017).

Didalam islam manusia merupakan wakil Allah SWT dimuka bumi yang diutus oleh Allah SWT untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah SWT tentang pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"." (QS. Al-Baqarah: 30)

Didalam Al Quran juga terdapat banyak ayat yang dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras, rajin dan tekun diberbagai bidang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki guna untuk memakmurkan bumi, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُكَ مِنْكُمْ جُمُوعًا يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَعْزَمَ دَعْوًا مِّنْ دَعْوَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَسَوْفَ نَجْعَلُ لَهُ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُكَ مِنْكُمْ جُمُوعًا يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَعْزَمَ دَعْوًا مِّنْ دَعْوَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَسَوْفَ نَجْعَلُ لَهُ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"." (QS. Hud: 61)

Pulau Jawa merupakan pulau terbesar di Indonesia dan sebagian besar penyebaran industri di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sehingga peran investasi di Pulau Jawa sangat penting dan harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Investasi di Pulau Jawa terdiri dari investasi dalam negeri atau PMDN dan investasi dari luar negeri atau PMA. Pada umumnya investasi digunakan sebagai pengembang sebuah usaha yang bersifat terbuka dan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Sudirman & Alhudori, 2018). Dalam penelitian ini, variabel investasi menggunakan data

PMDN di Pulau Jawa tahun 2010 – 2019. Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan besaran investasi PMDN di Pulau Jawa.

Tabel 1.2. Penanaman Modal Asing Dalam Negeri
di Pulau Jawa tahun 2010 – 2019 (miliar rupiah)

Tahun	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jakarta	Yogyakarta	Banten
2010	15.799,80	795,40	8.084,10	4.598,50	10,00	5.852,50
2011	11.194,30	2.737,80	9.687,50	9.256,40	1,60	4.298,60
2012	11.384,00	5.797,10	21.520,30	8.540,10	334,00	5.117,50
2013	9.006,10	12.593,60	34.848,90	5.754,50	283,80	4.008,70
2014	18.726,90	13.601,60	38.132,00	17.811,50	703,90	8.081,30
2015	26.272,90	15.410,70	35.489,80	15.512,70	362,40	10.709,90
2016	30.360,20	24.070,40	46.331,60	12.216,90	948,60	12.426,30
2017	38.390,60	19.866,00	45.044,50	47.262,30	294,60	15.141,90
2018	42.278,20	27.474,90	33.333,10	49.097,40	6.131,70	18.637,60
2019	49.284,20	18.654,70	45.452,70	62.094,80	6.298,80	20.708,40
Rata-rata	25.269,72	14.100,22	31.792,45	23.214,51	1.536,94	10.498,27

Dari tabel 1.2 diatas kita dapat melihat bahwa rata-rata PMDN tertinggi di Pulau Jawa sebesar Rp 31.792,45 di Jawa Timur. Besaran PMDN kedua di provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar Rp 25.269,72 dan rata-rata PMDN terendah berada di provinsi Yogyakarta dengan rata-rata sebesar Rp 1.536,94. Hal ini sejalan dengan banyaknya kawasan industri yang memang berada di kawasan provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan di Yogyakarta hanya memiliki satu kawasan industri yaitu Kawasan Industri Piyungan Creative Economy Park yang dikelola oleh PT. Yogyakarta Isti Parama.

Wujud nyata investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan adalah pemerintah mengalokasikan pengeluaran khusus untuk bidang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar tingkat pendidikan setiap

masyarakat mengalami peningkatan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan potensinya untuk dapat memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Bidang pendidikan mempunyai peran yang penting dalam menentukan kualitas manusia. Implikasinya, semakin tinggi tingkat pendidikan dari tenaga kerja maka akan semakin tinggi pula produktivitasnya dan dengan begitu akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi disuatu negara (SBM, 2014).

Seiring dengan perkembangannya, pendidikan menjadi sarana yang ampuh sebagai investasi sumber daya manusia. Dengan adanya pemikiran tersebut maka timbul pemikiran-pemikiran baru melalui analisis kebijakan pembangunan pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia hanya terdapat satu sistem pendidikan yang telah diatur oleh Undang-Undang 1945, namun selama ini dapat dikatakan belum memiliki wujud yang jelas dan sistematis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti terdapat beberapa gejala rendahnya efisiensi dalam pengelolaan dan tingkat efektifitas yang rendah dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, untuk dapat melihat apakah investasi dalam bidang pendidikan mengalami perkembangan atau tidak membutuhkan jangka waktu yang lama.

Dibawah ini terdapat tabel 1.3 yang menunjukkan besaran Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Pulau Jawa pada tahun 2010 – 2019. Dalam

tabel tersebut menunjukkan bahwa besaran pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan mengalami fluktuasi. Dari tahun 2010 hingga tahun 2019, rata-rata pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan jumlah terbesar adalah Provinsi Jakarta dengan nominal Rp. 27.832,73 miliar. Sedangkan rata-rata pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan jumlah terkecil adalah Provinsi Yogyakarta dengan nominal Rp. 2.764,40 miliar.

Tabel 1.3. Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Pulau Jawa tahun 2010 - 2019 (miliar rupiah)

Tahun	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jakarta	Yogyakarta	Banten
2010	12.551,66	12.679,00	12.646,27	64.241,69	1.828,41	2.510,14
2011	17.117,62	17.831,44	18.568,97	81.151,63	2.150,74	3.971,22
2012	18.392,76	20.207,33	20.993,29	10.120,37	2.693,88	4.338,91
2013	21.299,19	22.428,86	23.084,74	12.815,35	2.974,02	5.163,51
2014	23.202,12	23.260,16	23.077,30	14.663,45	2.527,52	5.084,33
2015	24.619,96	22.769,89	26.402,07	16.781,32	2.266,20	4.873,55
2016	28.131,13	25.533,71	29.624,88	18.899,20	3.733,64	7.779,36
2017	24.002,28	22.590,54	23.611,20	14.143,63	3.023,18	6.314,79
2018	25.827,61	24.108,79	27.351,76	21.449,55	3.006,56	7.115,52
2019	28.512,62	26.867,72	30.020,64	24.061,10	3.439,88	7.984,13
Rata-rata	22.365,69	21.827,74	23.538,11	27.832,73	2.764,40	5.513,55

Sumber: DJPK

Selain bidang pendidikan, pemerintah juga melakukan investasi melalui bidang kesehatan yang juga menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehat sendiri menurut WHO (*World Health Organization*) adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang memungkinkan individu untuk hidup secara produktif baik dalam aspek sosial maupun dalam aspek ekonomi. Dalam bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya (Bintang & Woyanti, 2018).

Dari Tabel 1.4 angka harapan hidup di Pulau Jawa pada tahun 2010-2019 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Dari ke enam provinsi yang berada di Pulau Jawa, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang memiliki rata-rata angka harapan hidup tertinggi yaitu sebesar 74,60 tahun. Sedangkan Provinsi Banten memiliki rata-rata angka harapan hidup terendah dengan 69,25 tahun.

Tabel 1.4. Angka Harapan Hidup di Pulau Jawa tahun 2010-2019 (tahun)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jawa Barat	71.34	71.61	71.87	72.14	72.27	72.45	72.48	72.50	72.69	72.92	72.23
Jawa Tengah	72.78	72.96	73.14	73.33	73.92	74.00	74.05	74.09	74.19	74.25	73.67
Jawa Timur	69.95	70.07	70.19	70.39	70.50	70.73	70.74	70.76	70.93	71.23	70.55
Jakarta	71.76	71.91	72.08	72.24	72.32	72.48	72.57	72.60	72.72	72.82	72.35
Yogyakarta	74.21	74.31	74.41	74.50	74.54	74.72	74.73	74.76	74.84	74.95	74.60
Banten	68.54	68.72	68.91	69.09	69.18	69.48	69.49	69.52	69.67	69.89	69.25

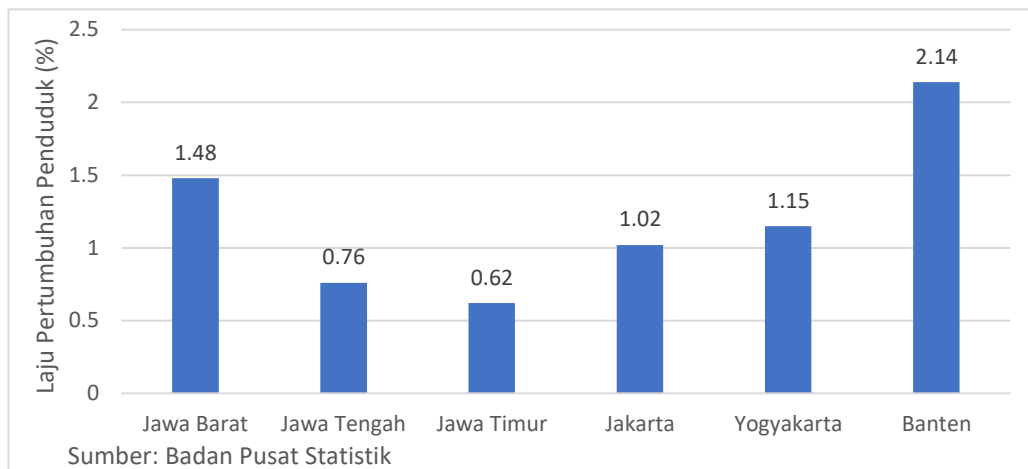
Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wyk dan Bradshaw (2017), angka harapan hidup yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Menurut Mariyanti dan Mahfudz (2016), mengonsumsi nutrisi dalam konteks kesehatan akan dapat memberikan dampak pada tingkat kemiskinan sehingga negara yang penduduknya sehat juga diyakini akan memiliki perekonomian yang “sehat” juga.

Indonesia merupakan negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebesar 268.074.600 penduduk. Jumlah penduduk merupakan banyaknya

orang yang mendiami suatu wilayah negara atau daerah. Jumlah penduduk memiliki peranan didalam pembangunan ekonomi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan memperluas pasar yang kemudian akan meningkatkan spesialisasi dan pembagian kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Haq & Yuliadi, 2018). Jumlah penduduk yang besar bisa dijadikan sebagai potensi tetapi sekaligus juga menjadi sebuah tantangan dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk sendiri pada dasarnya memiliki peran, yaitu sebagai subjek dan objek dalam pembangunan (Wardhana et al., 2020). Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan. Sedangkan sebagai objek, penduduk merupakan pihak yang dibangun sekaligus sebagai penikmat hasil dari pembangunan. Maka dari itu, penduduk merupakan pelaku dan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Pada Tabel 1.5 laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2019 adalah sebesar 2,14% di Provinsi Banten dan diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48% , Provinsi DIY sebesar 1,15% , Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,02% , dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,76%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah sebesar 0,62% di Provinsi Jawa Timur.



Tabel 1.5. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Pulau Jawa

tahun 2010 - 2019 (persen)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah pertumbuhan ekonomi dengan mengangkat judul “*Analisis Pengaruh PMDN, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Angka Harapan Hidup dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2010 – 2019*”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa ?
3. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa ?

4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana hubungan penanaman modal dalam negeri dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
2. Menganalisis bagaimana hubungan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
3. Menganalisis bagaimana hubungan angka harapan hidup dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
4. Menganalisis bagaimana hubungan jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh PMDN, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, angka harapan hidup dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.